

ky
Dag. 07/05
Roc
P

SKRIPSI

Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

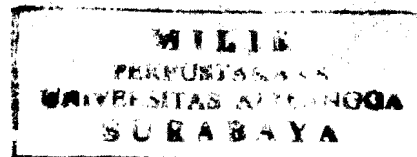


MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Hanafi Rachman

NIM. 039814679

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

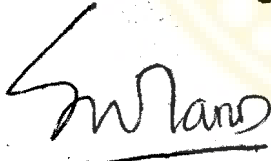


***Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam
Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat***

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sinar Ayu Wulandari".

**Sinar Ayu Wulandari, SH, MH,
NIP. 132 133 957**

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hanafi Rachman".

**Hanafi Rachman
NIM. 039814679**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

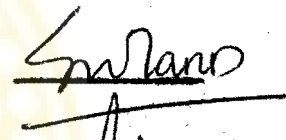
**Skripsi ini telah diuji dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 26 Januari 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

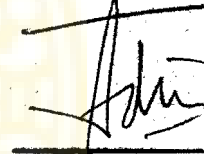
1. Ketua : Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M. Hum.



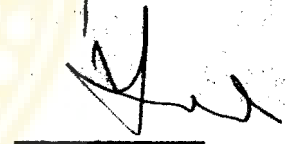
2. Anggota : 1. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



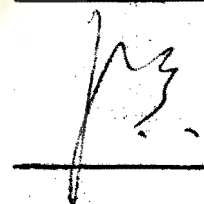
3. L. Budi : Kagramanto, S.H., M.H.



4. Hj. Jani Purnawanty, S.H., SS, LLM.



5. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* merupakan suatu teori yang digunakan untuk menilai terhadap tindakan yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999. Dapat juga dikatakan bahwa *per se illegal* dan *rule of reason* merupakan standar legalitas dalam menilai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999. Kedua teori tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, namun perbedaan yang paling signifikan adalah dalam hal pembuktian dimana dalam *per se illegal*, perjanjian, ataupun perbuatan tertentu dianggap secara *inheren* bersifat anti kompetitif dan merugikan tanpa perlu adanya pembuktian lebih lanjut bahwa perjanjian atau perbuatan yang dituduhkan tersebut secara nyata telah merusak persaingan, sedangkan dalam *rule of reason* diperlukan adanya pembuktian terhadap perjanjian ataupun perbuatan yang dituduhkan menimbulkan dampak negatif bagi persaingan secara signifikan.
- b. Pada pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pelarangan yang bersifat *per se illegal* dilihat dari tidak disebutkan dalam perumusan pasal tentang persyaratan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat. Pada pasal-pasal yang dilarang secara *rule of reason*, dilihat dari kata-kata dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penggolongan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara *per se illegal* dan *rule of reason* tersebut merupakan upaya yang nantinya diharapkan mampu memberi kepastian adanya suatu pasal dilarang secara *per se illegal* dan pasal lainnya dilarang secara *rule of reason*.

2. Saran

- a. Teori *per se illegal* dan *rule of reason* merupakan teori yang melandasi UU No.5 Tahun 1999. Seluruh peraturan Larangan Praktek Monopoli baik yang terdapat di Indonesia ataupun negara lain yang ada di dunia menggunakan kedua teori tersebut untuk menilai dan memeriksa kasus-kasus pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 sehingga disarankan pengkajian dan penelitian yang lebih intensif terhadap kedua teori tersebut oleh para praktisi. Eksistensi pembuat undang-undang diharapkan dapat memberi rumusan yang lebih baik terhadap teori *per se illegal* dan *rule of reason* yang nantinya akan memberi batasan yang lebih jelas terhadap perbedaan kedua teori tersebut dan lebih jauh lagi membuka kesempatan untuk menciptakan peraturan Larangan Praktek Monopoli yang lebih sempurna.

- b. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang persaingan usaha, banyak pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak dijelaskan lebih lanjut dibagian penjelasan undang-undang tersebut sehingga menimbulkan penafsiran yang luas sehingga disarankan terbukanya kemungkinan terhadap amandemen UU No. 5 Tahun 1999 jika dirasa UU tersebut tidak lagi membawa manfaat sesuai dengan tujuannya. Namun perubahan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 juga harus dilakukan berdasar pengkajian yang mendalam yang dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum, praktisi hukum dan para akademisi.